



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Sarolangun dengan visi “ ***Sarolangun Lebih Sejahtera***’ untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubaham Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2022.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 sebagai diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan focus pada peningkatan Akuntabilitas dan Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 memberikan informasi tentang Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta hasil evaluasi Capaian Kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2021 serta komitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang.



perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Kemudian Dalam penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing SKPD, namun diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi parameter peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2020-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang tahun 2022 terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, masih terdapat satu sasaran yang belum memuaskan atau dalam kategori kurang. Adapun pencapaian sasaran secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Sasaran Strategis atau 9.09 % diperoleh pencapaian cukup yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 2 (Dua) Sasaran Strategis atau 18.18 % diperoleh pencapaian baik sekali yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.



➤ 8 (Delapan) Sasaran Strategis atau 72.73 % diperoleh pencapaian baik yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Tabel Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	86,91	81,96	94,30	85,97	84,01	97,72
2	Meningkatnya Akses Terhadap Air Bersih dan Ketersediaan Jaringan Irigasi	Akses Terhadap Air Minum Layak	%	95,15	79,93	84	91,82	93,33	101,64
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	52,08	21,6	41,47	49,25	29	58,88

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Tingkat Kelulusan SD dan SMP	Tahun	100	100	100,00%	100	100	100
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,01	8,12	90,10%	8,03	8,04	100,1
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,8	12,47	97,40%	12,67	12,28	96,9
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,33	69,49	99,81	69,25	69,21	99,94



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai Kompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,9	5,22	93,47	5,8	5,52	104,82
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,32	66,74	93,58	72,12	64,86	89,93

TABEL 3.9
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
6.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sector Unggulan Daerah Serta Kesejahteraan Petani	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,94	4,32	109,64	3,89	1,31	33,68
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	3,25	1,38	42,46	0,9	1,35	150
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,42	3,95	72,88	5,07	2,92	57,59
		Nilai Tukar Petani	%	99,04	135,08	136,39	95,04	138,79	146,03



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
7	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	51	53.33	104	50.7	45	88.75
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86	91.25	106	85	90.3	106
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48.11	53.98	112	48.11	53.98	112
	Meningkatkan Kinerja ASN	Mutu Pelayanan		Sangat Baik	Sangat Baik	100	Sangat Baik	Sangat Baik	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2021	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP		BB	B	B	B

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	%	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
10	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan Pemenuhan hak Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	91.32	90.81	99.5	91,12	90.55	99,37



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	86.89	93.06	107.10	86.67	92.46	106.68
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	82.00	85.09	103.76	80.3	79.81	99.37
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	Nilai	82.00	82.45	100.55	80.5	80.96	100.57

Dari tabel diatas dapat kita lihat dari semua Sasaran capaian dan indikatornya sangat baik, adapun rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 adalah sebesar 94,09% Pencapaian kinerja input dan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 adalah sebesar RP. **1.199.030.839.984,21** setelah mengalami pergeseran.

Melalui Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	
ESEKUTIF.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I - 1
1.1. Isu Strategis.....	I - 3
1.2. Kondisi Kabupaten Sarolangun	I - 3
1.1.1. Kondisi Geografis	I - 4
1.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun	I - 5
1.1.3. Demografis Kabupaten Sarolangun	I - 6
1.1.4. Perekonomian Masyarakat.....	I - 6
1.1.4.1. Perikanan dan Peternakan	I - 6
1.1.4.2. Perkebunan	I - 9
1.2.4.3. Energi dan Industri	I - 10
1.2.4.4.1. Energi	I - 10
1.2.4.4.2. Industri	I - 11
1.2.4.5. Pariwisata	I - 12
1.2. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi.....	I - 14
1.2.1. Kewenangan dan Tugas Pokok.....	I - 14
1.3.2. Struktur Organisasi.....	I - 16
1.4. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun	I - 18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan.....	II - 20
2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun	II - 23
2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun	II - 23
2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun	II - 24
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun ..	II - 33
2.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun.....	II - 33
2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun	II - 34
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	II - 40
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III - 44
3.1.1. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	III - 49
3.1.2. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	III - 55
3.1.3. Akses Terhadap Air Minum Layak	III - 56
3.1.4. Tingkat Kelulusan SD dan SMP	III - 61
3.1.5. Rata-rata Lama Sekolah	III - 62
3.1.6. Harapan Lama Sekolah.....	III - 62
3.1.7. Usia Harapan Hidup.....	III - 64
3.1.8. Tingakt Pengangguran Terbuka	III - 66
3.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	III - 67



3.1.10. Persentase Subuh Keliling Yang dilaksanakan dimasjid ..	III -74
3.1.11. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	III -75
3.1.12. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	III -75
3.1.13. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	III -75
3.1.14. Nilai Tukar Petani	III -75
3.1.15. Persentase Penduduk Miskin	III -75
3.1.16. Indeks Kualitas Air	III -77
3.1.17. Indeks Kualitas Udara	III -77
3.1.18. Indeks Kualitas Lahan	III -77
3.1.19. Predikat Sakip	III -78
3.1.20. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	III -79
3.1.21 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	III -81
3.1.22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	III -82
3.1.23. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	III -83
3.1.24. Indeks Kepuasan Dinas Kesehatan	III -84
3.1.25. Indeks Kepuasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	III -87
BAB IV PENUTUP	IV -90





BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan+pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan,sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara termasuk Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKj merupakan bagian dari SAKIP yang secara implisit merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka perbaikan dan mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah.

1.1. ISU STRATEGIS

Berdasarkan rangkaian proses sebagaimana dipaparkan dalam bab ini, ada beberapa rumusan isu strategis Kabupaten Sarolangun periode 2017-2022 dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

1. infrastruktur
2. Tata kelola Pemerintahan (Governance)
3. Daya saing daerah
4. Kesejahteraan masyarakat
5. Lingkungan hidup
6. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran

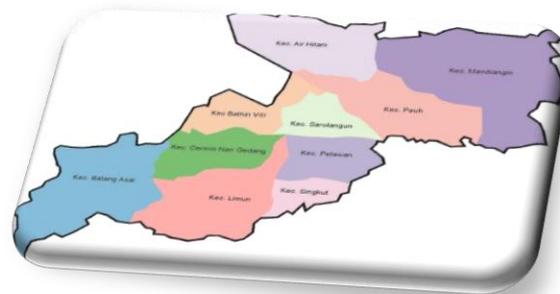
Kondisi Kabupaten Sarolangun

Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi.

1.1.1. Kondisi Geografis Daerah



Kabupaten Sarolangun berada pada posisi 102^o 03' 39" sampai 103^o 13' 17" BT dan 01^o 53' 39" LS sampai 02^o 46' 24" LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis.

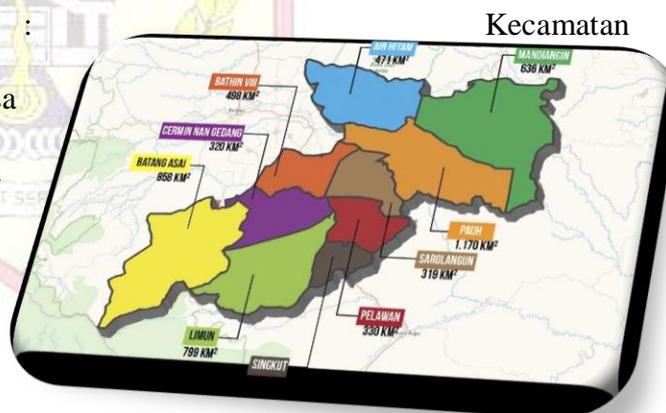


Keadaan iklim rata-rata berkisar antara 23°C sampai dengan 32°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa pedesaan.

Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.

Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan





desa pedesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu kelurahan Dusun Sarolangun, kelurahan Pasar Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1 kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa merupakan desa pedesaan.

Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan Kecamatan Mandiangin terdiri dari 18 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan, Kecamatan Mandiangin Timur terdiri dari 10 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan.

1.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun

Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858 km², Kecamatan Limun 799 km², Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km², Kecamatan Pelawan 330 km², Kecamatan Singkut 173 km², Kecamatan Sarolangun 319 km², Kecamatan Batin VIII 498 km², Kecamatan Pauh 1.770 km², Kecamatan Air Hitam 471 km², Kecamatan Mandiangin 636 km².

1.1.3. Demografis Kabupaten Sarolangun



Menurut Laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, jumlah penduduk kabupaten sarolangun berdasarkan jenis kelamin laki-laki 142.293 jiwa dan perempuan 137.239 jiwa total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun 279.532 jiwa. Dapat kita lihat table dibawah ini:

**JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
KABUPATEN SAROLANGUN SEMESTER II TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMNDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BATANG ASAI	10.048	9.871	19.919
2	LIMUN	9.802	9.444	19.246
3	SAROLANGUN	29.690	29.011	58.701
4	PAUH	13.219	12.536	25.755
5	PELAWAN	18.059	17.668	35.727
6	MANDIANGIN	12.721	12.177	24.898
7	AIR HITAM	13.639	12.632	26.271
8	BATHIN VIII	10.729	10.379	21.108
9	SINGKUT	21.195	20.421	41.616
10	CERMIN NAN GEDANG	7.119	6.889	14.008
11	MANDIANGIN TIMUR	6.885	6.326	13.211
	TOTAL	153.106	147.354	300.460

Sumber : DKB semester II tahun 2022 (data diolah)

1.1.4. Perekonomian Masyarakat

1.1.4.1. Perikanan dan Peternakan

Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Sarolangun terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai & Danau). Produksi perikanan yang terdapat di Kabupaten Sarolangun tahun terakhir (Tahun 2022) sebesar 2.970 ton. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :



TABEL 1.4.
JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI BUDI DAYA IKAN DI KOLAM DAN KERAMBA
PER KECAMATAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

No	Kecamatan	Kolam (Ton)	No	Kecamatan	Kolam (Ton)
1	Sarolangun	1254013	6	Batang Asai	34832
2	Pelawan	18375	7	Pauh	322303
3	Singkut	1567516	8	Mandiingin	51292
4	Limun	18375	9	Bathin VIII	34834
5	Cermin nan Gedang	34832	10	Air Hitam	51295
11	Mandiingin Timur				34833

Sumber: Dinas Perikanan Disnakkab Kab. Sarolangun 2022

TABEL 1.5.
JENIS PERIKANAN YANG BUDIDAYANYA DI KOLAM DAN KERAMBA DI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

No.	Jenis Ikan	Tahun 2022		No	Jenis Ikan	Tahun 2022	
		Produksi (Ton)	Nilai (Rp.00)			Produksi (Ton)	Nilai (Rp.00)
1	Ikan Mas	342194		4	Ikan Patin	754334	
2	Ikan Nila	701432		5	Lele	786136	
3	Gurami	319018		6	Lainnya	229476	
Jumlah							

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2022)

Penyelenggaraan bidang usaha peternakan cukup berkembang di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dapat dilihat beragamnya jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat . populasi ternak pada tahun 2016 dan 2022 di Kabupaten Sarolangun dan gambaran tentang rincian usaha peternakan berkenaan dengan jenis ternak yang diusahakan dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :



TABEL 1.6.
POPULASI KEADAAN PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 – 2021

No	Jenis Usaha Ternak	Jumlah						Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Ternak Sapi Potong							
	a. Jumlah Populasi	9.225	9.419	9.561	9.680	9.858	9.807	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	1.780	1.782	1.840	1.739	1.864	1.866	Ekor
	c. Jumlah Produksi Daging Ternak	227.147	-	286.488	279.170	328.828	329.181	Kg
2	Ternak Kerbau							
	a. Jumlah Populasi	8.145	8.754	8.880	8.945	9.016	9.060	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	1.187	1.474	1.483	1.486	1.490	1.492	Ekor
	c. Jumlah Produksi Daging Ternak	242.291,20	-	244.101,80	244.596	245.254	272.066	Kg
3	Ternak Kecil (Kambing)							
	a. Jumlah Populasi Kambing	45.658	55.735	46.298	46.325	46.379	44.223	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	3.654	3.653	3.671	3.689	3.689	3.690	Ekor
	c. Jumlah Produksi (Domba)	40.705,56	-	40.894,94	41.095	41.095	41.106	Kg
	a. Jumlah Populasi Domba	16.293	25.126	16.354	15.715	16.436	15.125	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	1.369	1.372	1.414	1.426	1.420	1.421	Ekor
	c. Jumlah Produksi	15.086,38	-	15.582,28	15.715	15.648	15.659	Kg
4	Unggas							
	a. Ayam kampung							
	- Jumlah Populasi	324.603	327.424	774.305	297.450	302.543	282.112	Ekor
	- Produksi Daging	347.803,39	361.673	361.782,52	361.846,04	361.019	494.549	Kg
- Produksi Telur	2.537.691	2.842.057		2.789.399	2.736.978	398.002	Butir	



	b. Jumlah Ayam Pedaging			411.827,58				
	- Jumlah Populasi	405.108	405.108		399.505			Ekor
	- Produksi Daging	398.499,60	399.413	361.746	405.108			Kg
	c. Jumlah Ayam Petelur			813.741				
	- Jumlah Populasi				511.100		19.437	Ekor
	- Produksi Daging	138.068	138.891			8.800	18.972	Kg
	- Produksi telur			506.133		136.694	785.051	Butir
	d. Jumlah itik	901.119						
	- Jumlah Populasi					539.742		
	- Produksi Daging		41.599			40.147	32,720	Ekor
	- Produksi Telur	44.473	14.044			14.243	14,246	Kg
		15.540,80					269.227	Butir
		2.849.189,88	2.577.110			2.547.946		

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2022)

1.1.4.1.1. Perkebunan

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan Perkebunan Khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet, dimana merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan perkembangannya . Hal ini terlihat dari jumlah luas area perkebunan dan jumlah produksi yang cukup besar . Luas perkebunan Karet di Kabupaten Sarolangun sebanyak 126.725 hektar dan luas perkebunan sawit sebanyak 35.454 hektar pada tahun 2016. Selain itu, usaha perkebunan yang juga berkembang di kabupaten Sarolangun adalah kopi, lada, pinang, kulit kayu manis, Kelapa dalam, Nilam dan tebu.



1.1.4.2. Energi Dan Industri

1.1.4.2.1. Energi

Jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di kabupaten Sarolangun meliputi hampir seluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan. Sampai tahun 2015, jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun walaupun masih ada sedikit desa yang belum terjangkau dan masih ada pemadaman listrik sekali – kali. Jumlah desa yang belum teraliri listrik pada tahun 2015 sebanyak 18 desa dalam kabupaten Sarolangun . Apalagi dengan telah dibangunnya PLTU Samaran maka akan dapat memenuhi seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun bahkan surplus sumber energi listrik di Kabupaten Sarolangun. Apabila produksi energi listrik yang bersumber dari bahan baku batu bara yang tersedia dapat di kelola di Kabupaten Sarolangun sendiri, maka akan dapat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Kabupaten tetangga. Jumlah sumber energi listrik Kabupaten Sarolangun tahun 2016 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.7.berikut :

TABEL 1.7.
JUMLAH SUMBER ENERGI LISTRIK KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2016 – 2022

No	Sumber Energi Listrik	Tahun		2022			
		2016			7		
		Banyaknya Mesin (Unit)	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)	Banyaknya Mesin (Unit)	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)
1	PLTG	-			-	-	-
2	PLTD Batang Asai	4	920	920	4	920	600
3	PLTS	-	-	-	-	-	-
4	PLTU Semaran	2	14.000	12.000	2	14.000	12.000

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2022)



Sumber energi lain yang juga memiliki peranan penting bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah ketersediaan bahan bakar terutama minyak tanah , bensin, dan solar. Untuk menunjang pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat kabupaten Sarolangun, di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 terdapat fasilitas pelayanan seperti keberadaan SPBU sebanyak 6 Unit , dan UPPDN Pertamina sebanyak 2 Unit . Jumlah masing – masing fasilitas pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.8.

TABEL 1.8.
JUMLAH SARANA PELAYANAN BAHAN BAKAR KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2016 – 2022

No	Sarana Pelayanan Bahan Bakar	Jumlah		Satuan
		2016	2022	
1	SPBU	6	7	Buah
2	Depo Minyak Tanah	27	27	Buah
3	UPPDN Pertamina	2	2	Buah

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2021)

1.1.4.2.2. Industri

Industri di Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan baik jumlah unit usaha tenaga kerja, nilai investasi maupun produksinya. Jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Sarolangun tahun 2016 dan 2022 sebanyak 1200 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.666 orang.

Dan pada tahun 2015 ada 5 perusahaan yang berskala besar yang bergerak di bidang usaha industry pengolahan buah sawit atau pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dengan kapasitas produksi 45-60 ton/jam yakni PT. Krena Duta Agrindo (KDA), PT. Bahana Karya Semesta, PT. Inti Guna Nabati (IGUN), PT. Lambang Sawit Perkasa (LSP) dan PT. Sukses Gemilang Palm (SGP), sedangkan untuk jenis usaha crumb rubber pada tahun 2015 sebanyak 1 perusahaan yakni PT. HEVEA dan pada tahun 2016 terjadi



penambahan 1 perusahaan crumb rubber yakni PT. Karet Bathin VIII yang berlokasi di kecamatan Bathin VIII.

1.1.4.3. Pariwisata

Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun yang juga dikenal dengan bumi sepucuk Adat Serumpun Pseko ini, sangat menjanjikan dengan berbagai jenis objek wisata mulai dari wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah.

Potensi – potensi wisata ini tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Objek yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Meski demikian, sebagian objek wisata yang terdapat di Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun butuh perhatian dan pemeliharaan serta pengelolaan yang baik agar dapat dinikmati baik oleh masyarakat Sarolangun maupun para wisatawan dari luar Kabupaten Sarolangun. Gambaran potensi wisata di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.9:

TABEL 1.9.
GAMBARAN POTENSI OBJEK WISATA YANG ADA
DI KABUPATEN SAROLANGUN.

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Keterangan
1	Sarolangun	Perkampungan Tradisional Muaro Sawah Panorama di antara Dua Jembatan Panorama Jembatan Beatrix Taman Perkantoran Gunung Kembang Danau Ladang Panjang Mesjid Al-Falah Pasar Sarolangun Mesjid Al- Sulthon Sarolangun Sport Center “ Sarolangun Emas”	Wisata Budaya Wisata ALam Wisata Alam Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Alam Wisata Rohani Wisata Rohani Wisata Kesehatan Jasmani
2	Batang Asai	Danau Kaco Minyak Wajang wali Air Terjun Telun Tujuh Air Terjun Mudek Niban Air Terjun Rantau Uba Air Terjun Narso Air Terjun Inum Air Terjun telun seluro	Wisata ALam Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam



		Makam Keramat Panorama Bukit Rayo Panorama Sungai Batang Asai Pendulang emas Tradisional Makam Keramat Bukit Lupo Batu Tinggi Arum Jeram Ma. Talang Olah Raga Paralayang	Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Minat Khusus Wisata Minat Khusus
3	Air Hitam	Taman Nasional Bukit Dua Belas Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) Habitat Kayu Bulian Habitat Tanaman Anggrek/Neventes Air Panas Paku Aji Sungai Air Jernih Air Terjun Talun Batu Sesudung Batu Batumang Air Meruap Jernih	Wisata Alam Wisata Budaya Ecowisata Ecowisata Ecowisata Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam
4	Limun	Dam Muaro Kutur Goa Bukit Bulan Goa Calow Petak Panorama Alam Bukit Temalun Panorama Alam Bukit Bulan Panorama Alam Bukit Barisan Panorama Hutan Adat Panorama Sungai Batang Limun Panorama Sungai Muaro Limun Panorama Sungai Binjai Lubuk Bedorong	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam
5	Mandiingin	Hutan Masyarakat	Wisata Alam
6	Pauh	Danau Pauh Batu Tulis	Wisata Alam Wisata Budaya
7	Pelawan	Danau Kampung Pulau Danau Godang Semaru Perkebunan Durian Semaru Persawahan Payo Mangkuang Makam Karomah Datuk Ijuk Lesung Batu Desa Lubuk Sepuh Lesung Batu Desa Rantau Tenang Rumah Tuo Lubuk Sepuh	Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya

Pengembangan kegiatan wisata di kabupaten Sarolangun perlu didukung usaha perhotelan. Usaha perhotelan di Kabupaten Sarolangun baru mulai bergeliat sepanjang tahun 2015-2022, salah satunya dengan berdirinya Hotel Abadi di Sentra Bisnis Sarolangun yang mulai beroperasi pada tahun 2008. Meski jenis hotel yang dominan di Kabupaten Sarolangun meliputi jenis hotel non bintang, namun usaha perhotelan di



kabupaten Sarolangun mulai menjanjikan terutama sejak Pemkab Sarolangun dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut :

TABEL 1.10
JUMLAH HOTEL DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 – 2022

No	Jenis Hotel	Jumlah		Satuan	No	Jenis Hotel	Jumlah		Satuan
		2018	2022				2018	2022	
1	Hotel Bintang Lima	-	-	Buah	5	Hotel Bintang Satu	-	-	Buah
2	Hotel Bintang Empat	-	-	Buah	6	Hotel Non Bintang	7	7	Buah
3	Hotel Bintang Tiga	1	1	Buah	7	Penginapan	7	7	Buah
4	Hotel Bintang Dua	-	-	Buah					

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2022)

2. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

1.2.1. Kewenangan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan olahraga;
- i. Penanaman modal;
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawain dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistic;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi:



- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energy dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

1.3.2. Struktur Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah pada Kabupaten Sarolangun terdiri dari, Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Bagian, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 4 Badan, 11 Kecamatan, 9 kelurahan, BPBD dan Kantor Kesbangpol.

Selain tata pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan, Persentase aparatur pemerintah (ASN) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 juga didukung oleh Apartaur yang sangat memadai. Dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 4.035 orang, aparatur pemerintah Kabupaten Sarolangun dari segi tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :



**REKAPITULASI JUMLAH PNS
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KEADAAN : DESEMBER 2022**

1 BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

NO	WILAYAH	GOLONGAN RUANG																				TOTAL
		GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
		Ia	Ib	Ic	Id	JML	Iia	Iib	Iic	Iid	JML	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	JML	IVa	IVb	IVc	IVd	JML	
1	Kabupaten Sarolangun	0	0	5	7	12	39	109	202	427	777	636	605	618	788	2647	427	135	36	1	599	4035

2 BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

NO	WILAYAH	GOLONGAN RUANG												TOTAL
		GOLONGAN I			GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	Kabupaten Sarolangun	12	0	12	385	392	777	1128	1519	2647	299	300	599	4035

3 BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

NO	WILAYAH	LAKI - LAKI									JML	PEREMPUAN									JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		
1	Kabupaten Sarolangun	2	150	1026	112	111	1	402	15	5	1824	2	88	1286	495	129	9	201	1	0	2211	4035

4 BERDASARKAN ESELONNERING DAN JENIS KELAMIN

NO	WILAYAH	ESELON I			ESELON II			ESELON III			ESELON IV			ESELON V			TOTAL
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	Kabupaten Sarolangun		0	0			0			0			0		0	0	0



5 BERDASARKAN PNS Pensiun

NO	WILAYAH	BULAN						TOTAL
		7	8	9	10	11	12	
1	Kabupaten Sarolangun	16	11	17	7	11	13	75

6 BERDASARKAN PNS TERKENA HUKUMAN DISIPLIN

NO	WILAYAH											TOTAL
		RINGAN			SEDANG			BERAT				
		R1	R2	R3	S1	S2	S3	B1	B2	B3	B	
1	Kabupaten Sarolangun	3	1	3	1	0	0	0	0	4	0	12

7 BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS JABATAN

NO	WILAYAH	JABATAN STRUKTURAL														TOTAL	
		LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1			
1	Kabupaten Sarolangun	0	70	191	7	4	15	287	1	22	89	13	0	6	131	418	

8 BERDASARKAN PENDIDIKAN JFT TENAGA KESEHATAN

NO	WILAYAH	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TENAGA KESEHATAN														TOTAL	
		LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1			
1	Kabupaten Sarolangun	0	22	34	1	0	0	57	0	25	71	4	0	0	100	157	



9 BERDASARKAN PENDIDIKAN JFT TENAGA GURU

NO	WILAYAH	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TENAGA GURU														TOTAL	
		LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1			
1	Kabupaten Sarolangun	0	13	348	8	99	1	469	0	12	684	8	130	2	836	1305	

10 BERDASARKAN PENDIDIKAN JFT LAINNYA

NO	WILAYAH	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TENAGA GURU														TOTAL	
		LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1			
1	Kabupaten Sarolangun	2	32	189	5	1	0	229	1	11	126	9	1	0	148	377	

11 BERDASARKAN PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO	WILAYAH	JABATAN FUNGSIONAL UMUM																				TOTAL	
		LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD			
1	Kabupaten Sarolangun	0	17	546	26	19	0	316	15	5	944	0	10	542	62	18	1	142	1	0	776	1720	

(Sumber Data BKPSDM Kab. Sarolangun)



3. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Untuk mewujudkan pemerintah yang berbasis elektronik (*e-Government*),

Pemerintah Kabupaten sarolangun telah melakukan inovasi sistem pelaporan dengan menggunakan sistem E-SAKIP yang diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung



melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/HK.HAM/X/2018 dan nomor 119/3996-Bag. KS tanggal 30 Oktober 2018.

Dengan sistem berbasis elektronik ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan Akuntabilitas yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas baik program maupun anggaran.



Gambar. 1.1
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang E-SAKIP
Antara
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 20 /BAPPEDA/ 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

2.1. Perencanaan

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,



keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undang-undang otonomi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu:



- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar terwujud *good government*. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang



dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun

2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai tugas yang diemban. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sarolangun selama lima tahun (2017-2022) adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”.

Visi tersebut terdiri dari dua- frase, yaitu *lebih* dan *sejahtera*. Frase *lebih* menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata *sejahtera* mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari pentahapan capaian pembangunan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2026.



2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sarolangun ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum***
- 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia , penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya***
- 3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal***
- 4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan***
- 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender***
- 6. Meningkatkan pelayanan publik.***

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 mengalami perubahan (penggabungan beberapa tujuan) dari 15 tujuan menjadi 8 tujuan. Selain itu terdapat penambahan indikator tujuan pada setiap tujuan yang sebelum perubahan tidak ada indikator tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun pada perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia



3. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sector-sektor potensi lokal
5. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
6. Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender
8. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 mengalami perubahan (penggabungan beberapa sasaran) dari 21 sasaran menjadi 12 sasaran. Sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun pada perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah
2. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi
3. Meningkatnya kualitas pendidikan
4. Meningkatnya kualitas kesehatan
5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
6. Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dalam masyarakat
7. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah serta Kesejahteraan Petani
8. Menurunnya angka kemiskinan
9. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
10. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja
11. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
12. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik



1. Dalam rangka pencapaian Misi I yaitu **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum**, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebagai berikut :

a Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, dengan indikator tujuan adalah Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, dan sarannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah
2. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi I disajikan sebagai berikut :

Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 1 Tujuan 1

LOGICAL FRAMEWORK MISI 1 TUJUAN 1			
MISI	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN UMUM		
TUJUAN	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH		
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH		
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH	MENINGKATNYA AKSES TERHADAP AIR BERSIH DAN KETERSEDIAAN JARINGAN IRIGASI	
INDIKATOR SASARAN	JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP	AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK
SKPD PENANGGUNG JAWAB	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PU & PR, DINAS KESEHATAN, PDAM	DINAS PU & PR, DINAS TPHP

2. Dalam rangka pencapaian Misi II yaitu **Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya**, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebagai berikut:



a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan indikator tujuan

adalah Indeks pembangunan manusia (IPM), dan sarannya adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan
- 3) Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

b. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam masyarakat, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kebebasan Berkeyakinan, dan sarannya adalah :

- 1) Meningkatnya Keimanan dan Nilai-nilai agama, Sosial dan Budaya dalam Masyarakat

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi II yang disajikan sebagai berikut:

Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 2 Tujuan 2

LOGICAL FRAMEWORK MISI 2 TUJUAN 2						
MISI	MENINGKATKAN KUALITAS SDM, PENGUATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA					
TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA					
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN		MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN		MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA	
INDIKATOR SASARAN	Angka Kelulusan SD/SMP	Rata-Rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	USIA HARAPAN HIDUP	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
SKPD PENANGGUNG JAWAB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		DINAS KESEHATAN, RSUD, DINAS PPKB		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	



Framework Pencapaian Misi 2 Tujuan 3

LOGICAL FRAMEWORK MISI 2 TUJUAN 3	
MISI	MENINGKATKAN KUALITAS SDM, PENGUATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA
TUJUAN	MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS KEBEBASAN BERKAYAKINAN
SASARAN	MENINGKANYA KEIMANAN DAN NILAI-NILAI AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MASYARKAT
INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE SUBUH KELILING (SUBLING) YANG DILAKSANAKAN DI MASJID
SKPD PENANGGUNG JAWAB	SELURUH SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

3. Dalam rangka pencapaian Misi III yaitu **Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal**, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektorsektor potensi lokal, dengan indikator tujuan adalah Pertumbuhan ekonomi, dan sarasanya adalah :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah Serta Kesejahteraan Petani
- 2) Menurunnya angka kemiskinan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi III yang isajikan sebagai berikut:



Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 3 Tujuan 4



4. Dalam rangka pencapaian Misi IV yaitu **Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan**, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks kualitas lingkungan, dan sasarnya adalah :

1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi IV yang disajikan sebagai berikut:



Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 4 Tujuan 5

LOGICAL FRAMEWORK MISI 4 TUJUAN 5			
MISI	MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN		
SASARAN	MENURUNNYA TINGKAT PENCEMARAN LINGKUNGAN		
INDIKATOR SASARAN	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS TUTUPAN LAHAN
SKPD PENANGGUNG JAWAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		

5. Dalam rangka pencapaian Misi V yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender**, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dan sarasanya adalah :

1) Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

b. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender, dengan indikator tujuan Indeks kesetaraan dan keadilan gender, dan dan sarasanya adalah:

1) Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi V yang disajikan sebagai berikut:



Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 5 Tujuan 6

LOGICAL FRAMEWORK MISI 5 TUJUAN 6		
MISI	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN RESPONSIF GENDER	
TUJUAN	MEWUJUDKAN PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	
SASARAN	MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
INDIKATOR SASARAN	PREDIKAT SAKIP	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH
SKPD PENANGGUNG JAWAB	SELURUH SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN	



LOGICAL FRAMEWORK MISI 5 TUJUAN 7		
MISI	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN RESPONSIF GENDER	
TUJUAN	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESETARAAN GENDER	
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	
SASARAN	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	
INDIKATOR SASARAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
SKPD PENANGGUNG JAWAB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

6. Dalam rangka pencapaian Misi VI yaitu **Meningkatkan pelayanan publik**, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, dengan indikator tujuan adalah Indeks pelayanan publik, dan sarasannya adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik.



Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi VI yang disajikan sebagai berikut:

Desain *logical Framework* Pencapaian Misi 6 Tujuan 8

LOGICAL FRAMEWORK MISI 6 TUJUAN 8			
MISI	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK		
TUJUAN	MEWUJUDKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PADA INSTANSI/ LEMBAGA YANG MELAYANI PUBLIK		
INDIKATOR SASARAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BIDANG PERIZINAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BIDANG KESEHATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BIDANG PELAYANAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN DAN RSUD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

1.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun. Tujuan merupakan target yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan yang terukur

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (*performance indikator*). Untuk itu tujuan mempunyai posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi yang dalam kurun waktu 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengelompokkan atas 8 (Delapan) tujuan sebagai berikut:



TABEL 2.1
PENGELOMPOKAN MISI DAN TUJUAN TAHUN 2021

MISI		NO	TUJUAN
PERTAMA	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum	1.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Daerah
KEDUA	Meningkatkan Kualitas SDM Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Sosial Budaya	2. 3.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Meningkatkan Nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam masyarakat
KETIGA	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Berbasis Potensial Lokal	4.	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal
KEEMPAT	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan	5.	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
KELIMA	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender	6. 7.	Mewujudkan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender
KEENAM	Meningkatkan Pelayanan Publik	8.	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik

1.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isi-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan factor kunci keberhasilan, sejalan



dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber sumber daya kedalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentu strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kabupaten Sarolangun.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur pada tahun 2020 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENGELOMPOKAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
		2.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi
2.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	3.	Meningkatnya kualitas pendidikan
		4.	Meningkatnya kualitas kesehatan
		5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja
3.	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, social dan budaya dalam masyarakat	6.	Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, social dan budaya dalam masyarakat
4.	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal	7.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah serta kesejahteraan petani
		8.	Menurunnya angka kemiskinan
5.	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	9.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan



6.	Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	10.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja
7.	Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender	11.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
8.	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik	12.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu selama tahun 2021 Sebanyak 67 Program adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
PROGRAM YANG Mendukung SASARAN TAHUN 2021

NO	SASARAN	NO	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1.	Program penyelenggaraan jalan
2.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan Irigasi	1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		3.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		4.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
		5.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		6.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Program pengelolaan pendidikan
		2.	Program pengembangan kurikulum
		3.	Program pendidik dan tenaga kependidikan
		4.	Program pengendalian perizinan pendidikan
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan	1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
		3.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		4.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		5.	Program pengendalian penduduk
		6.	Program pembinaan keluarga berencana (KB)



NO	SASARAN	NO	PROGRAM
5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1.	Program perencanaan tenaga kerja
		2.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		3.	Program penempatan tenaga kerja
		4.	Program hubungan industrial
		5.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
6.	Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, social dan budaya dalam masyarakat		
7.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah serta kesejahteraan petani	1.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		3.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
		4.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		5.	Program perizinan usaha pertanian
		6.	Program penyuluhan pertanian
		7.	Program pengelolaan perikanan budidaya
		8.	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		9.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		10.	Program perencanaan dan pengembangan industri
		11.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
		12.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
		13.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		14.	Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		15.	Program pengembangan ekspor
		16.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen
		17.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri



NO	SASARAN	NO	PROGRAM
8.	Menurunnya angka kemiskinan	1.	Program pemberdayaan sosial
		2.	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
		3.	Program rehabilitasi sosial
		4.	Program perlindungan dan jaminan sosial
		5.	Program penanganan bencana
		6.	Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh
		7.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		8.	Program pendidik dan tenaga kependidikan
9.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	1.	Program perencanaan lingkungan hidup
		2.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
		3.	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		4.	Program pengendalian bahan berbahaya dan limbah beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
		5.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		6.	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
		7.	pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
		8.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
		9.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
		10.	program pengelolaan persampahan



NO	SASARAN	NO	PROGRAM
10.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah
11.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	1.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		2.	Program perlindungan perempuan
		3.	Program peningkatan kualitas keluarga
		4.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
		5.	Program pemenuhan hak anak (PHA)
		6.	Program perlindungan khusus anak
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik	1.	Program pelayanan penanaman modal
		2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		3.	Program pendaftaran penduduk





1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk tahun 2018 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mencapai tujuan strategis telah melakukan perubahan RPJMD dengan menerapkan tata laksana dengan baik meliputi 12 (Dua belas) sasaran strategis. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2020 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, Perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel yang diukur dengan 25 (Dua puluh lima) indikator kinerja sebagai berikut:



TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INSTANSI
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1.	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	86.91	PUPR
2.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi	2.	Akses terhadap air minum layak	%	95.15	PUPR/DIN KES/PDAM/TPHP
		3.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	52.08	
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	4.	Tingkat kelulusan SD dan SMP	%	100	DISDIKBUD
		5.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.17	
		6.	Harapan lama sekolah	Tahun	12.81	
4.	Meningkatnya kesehatan	7.	Usia harapan hidup	%	69.33	DINKES
5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	8.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.90	DISNAKERTRANS
		9.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	71.32	
6.	Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dalam masyarakat	10.	Persentase subuh keliling(subling) yang dilaksanakan dimasjid	%	98.15	SKPD
7.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah serta kesejahteraan petani	11.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3.94	TPHP/DISNAKAN
		12.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	1.25	DISKOPURINDAG
		13.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5.42	
		14.	Nilai tukar petani	%	99.04	



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INSTANSI
8.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase penduduk miskin	%	8.48	DINSOS
9.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	16.	Indeks kualitas air	Indeks	51	DLH
		17.	Indeks kualitas udara	Indeks	86	
		18.	Indeks tutupan lahan	Indeks	48.11	
10.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	19.	Predikat sakip	Predikat	BB	SETDA
		20.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	INSPEKTORAT
11.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	21.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	91,32	DP3A
		22.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	-	
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik	23.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang perzinan	Indeks	86,89	DPMPSTP
		24.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang kesehatan	Indeks	81,80	DINKES
		25.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan kependudukan	Indeks	82.0	DISDUKCAPIL



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pengguna sumber daya organisasi oleh penerima amanah kepada pemberi amanah secara transparan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang mewujudkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kabupaten Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.



Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Skala pengukuran dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN LKJ 2021

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85% s.d 100%	Sangat Baik
2.	70% s.d < 85%	Baik
3.	55% s.d 70%	Cukup
4.	< 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

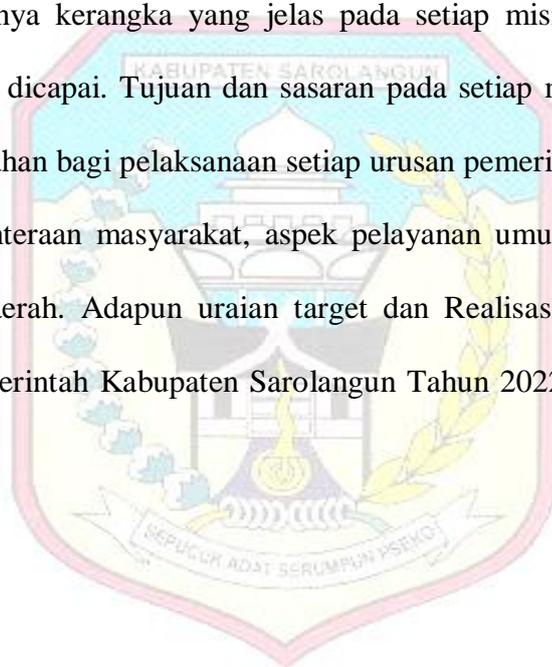
Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



Tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sarolangun telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Adapun uraian target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :





TABEL 3.2
PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1.	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	86,91	81,96	94,30
2.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi	2.	Akses terhadap air minum layak	%	95,15	79,93	84
		3.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	52,08	21,6	41,47
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	4.	Tingkat kelulusan SD dan SMP	%	100	100	100
		5.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,01	8,12	90,10
		6.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,8	12,47	97,40
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan	7.	Angka harapan hidup	%	69,33	69,49	99,81
5.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	8.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,9	5,22	93,47
		9.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	71,32	66,74	93,58



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, social dan budaya dalam masyarakat	10.	Persentase subuh keliling(subling) yang dilaksanakan dimasjid	%	98.15	-	-
7.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah serta kesejahteraan petani	11.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,94	4,32	109,64
		12.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	1,25	1,38	42,46
		13.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,42	3,95	72,88
		14.	Nilai tukar petani	%	99,04	135,08	136,39
8.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase penduduk miskin	%	9.18	8.48	92,37
9.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	16.	Indeks kualitas air	Indeks	51	53.33	104
		17.	Indeks kualitas udara	Indeks	86	91.25	106
		18.	Indeks tutupan lahan	Indeks	48.11	53.98	112



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
10.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	19.	Predikat saki	Predikat	BB	B	B
		20.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP
11.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	21.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	91.32	90.81	99.5
		22.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	-	-	-
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga yang melayani publik	23.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang perzinan	Indeks	86.89	93.06	107.10
		24.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang kesehatan	Indeks	81.80	85.09	103.76
		25.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan kependudukan	Indeks	82.00	82.45	100.55
TOTAL							2.180,78
RATA RATA							94,8165



TABEL 3.3
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	86,91	81,96	94,30	85,97	84,01	97,72

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

3.1.1 Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Dari tabel 3.3. dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pengungkapan akuntabilitas kinerja yang disajikan dalam Laporan LAKIP adalah hasil pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan bentuk tabel untuk menerangkan mengenai kegiatan/sasaran apa yang diukur, indikator yang dipakai, dan capaian yang dibandingkan dengan rencana. pengukuran kinerja Penyajian informasi akuntabilitas dalam bagian ini dibagi kedalam masing-masing tujuan dan sasaran yang meliputi antara lain:

1. Penjelasan singkat mengenai tujuan dan sasaran yang dibahas; Dalam penjelasan tujuan dan sasaran harus menguraikan sasaran/ tujuan yang akan dicapai yang dinyatakan dalam dokumen perjanjian kinerja ?

Tujuan dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, tujuan yang akan dicapai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Daerah

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dalam jangka menengah.



Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah
2. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi

2. Penjelasan hambatan atau kendala utama dalam pelaksanaan program/kegiatan ?

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap

Indikator Kinerja Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021, realisasi kinerjanya sebesar 84,01% dengan pencapaian sebesar 97,72%, dan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 81,96% dengan pencapaian sebesar 94,30%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 2,05%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada Indikator Kinerja persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

- Adanya revisi data jalan dan jembatan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penetapan SK ruas jalan sehingga terjadi adanya perbedaan data jalan.
- Adanya penambahan status ruas jalan kabupaten, dari jalan non status menjadi jalan kabupaten, (dari jalan perusahaan yang dalam kondisi tidak baik).
- Pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan dan jembatan.
- Penurunan kualitas jalan akibat masa pakai serta bencana alam seperti longsor yang sering terjadi, mengakibatkan turunnya persentase jalan baik.

3. Menjelaskan tindakan pemecahan masalah-masalah di masa yang akan datang dan strategi-strategi dalam rangka peningkatan kinerja ?

- Strategi-strategi untuk Indikator Kinerja **Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik** yaitu, akan dilakukan inventarisir dan identifikasi kembali terhadap pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dan disesuaikan dengan SK jalan terbaru guna percepatan pembangunan dan pemerataan wilayah di kecamatan yang mana akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian.



TABEL 3.4
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya Akses Terhadap Air Bersih Dan Ketersediaan Jaringan Irigasi	Akses Terhadap Air Minum Layak	%	95,15	79,93	84	91,82	93,33	101,64
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	52,08	21,6	41,47	49,25	29	58,88

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

3.1.2. Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Dari tabel 3.5. dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021, realisasi kinerjanya sebesar 29% dengan pencapaian sebesar 58,88%, dan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 21,6% dengan pencapaian sebesar 41,47%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,4%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada Indikator Kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

- Pemutakhiran data jaringan irigasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sedang berjalan, sehingga mempengaruhi data jaringan irigasi terkait perubahan status kewenangan penanganan jaringan irigasi.
- Alih fungsi lahan jaringan irigasi menjadi perkebunan sawit, dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- Minimnya dana, pemeliharaan, sertra peningkatan jaringan irigasi pada tahun 2022.

Menjelaskan tindakan pemecahan masalah-masalah di masa yang akan datang dan strategi-strategi dalam rangka peningkatan kinerja ?



- Strategi-strategi untuk Indikator Kinerja **Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik** yaitu, dalam hal pencapaian target, akan di akomodir lebih pada peningkatan kualitas hasil yang merupakan tolok ukur suatu keberhasilan pembangunan dengan cara menambah anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan irigasi dalam Kabupaten Sarolangun.

3.1.3. Akses Air Minum Layak

Akses terhadap air minum layak

Indikator Kinerja Akses terhadap air minum layak pada tahun 2021, realisasi kinerjanya sebesar 93,33% dengan pencapaian sebesar 101,64%, dan pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 79,93% dengan pencapaian sebesar 84%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,4%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada indikator kinerja akses terhadap air minum layak disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

- Kurang maksimalnya pemeliharaan dan pengelolaan SPAM, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas penunjang untuk berjalannya Sambungan Rumah (SR) seperti kapasitas pompa yang tidak memadai sehingga debit air yang dihasilkan berkurang.
- Terjadinya migrasi pengguna Sambungan Rumah (SR) ke penggunaan air tanah yang disebabkan oleh kualitas air dari Sambungan Rumah (SR) yang kurang baik akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta peneurunan debit air, sehingga jaringan menjadi tidak terpelihara.

Menjelaskan tindakan pemecahan masalah-masalah di masa yang akan datang dan strategi-strategi dalam rangka peningkatan kinerja ?

- Strategi-strategi untuk Indikator Kinerja **Akses Terhadap Air Minum Layak** yaitu, akan dilakukan sinkronisasi, pengendalian, inventarisir dan identifikasi suatu permasalahan terhadap perluasan akses air minum layak yang masih sangat di butuhkan masyarakat khususnya di daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan akan air minum layak agar apa yang menjadi tujuan dari visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sarolangun terpenuhi.



TABEL 3.5
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Tingkat Kelulusan SD dan SMP	Tahun	95,15	79,93	84	91,82	93,33	101,64
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	52,08	21,6	41,47	49,25	29	58,88
		Harapan lama sekolah	Tahun	95,15	79,93	84	91,82	93,33	101,64

NO	INDIKATOR KINERJA	NARASI
1	Tingkat Kelulusan SD dan SMP	<p>Dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada 2022 indikator kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya. Dan yang ditetapkan sebesar 100% berhasil terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 100%.</p> <p>Pada tahun 2022 Jumlah siswa SD yang mengikuti Ujian sebanyak 5.410 Siswa dan yang lulus sebanyak 5.410 Siswa, untuk Siswa SMP yang mengikuti ujian sebanyak 3.335 Siswa dan yang lulus sebanyak 3.335 siswa, jika dijumlahkan maka siswa yang lulus mencapai 100% Dibandingkan dengan capaian tingkat kelulusan SD dan SMP tahun 2021 sebesar 100%, terdapat kesamaan dengan capaian tahun tersebut, pencapaian target indikator kinerja sebesar 100 % tercapai karena program yang dijalankan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perubahan cara USBN selama pandemi COVID-19 dari tahun sebelumnya ujian dengan melalui daring menjadi tatap muka namun tetap menerapkan protokol kesehatan.</p>
2	Rata-rata lama sekolah	<p>Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia tercermin dari naik turunnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dengan link https://jambi.bps.go.id/indicator/26/1937/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html menunjukkan penduduk yang pada 2022 berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata mengayomi pendidikan selama 8,12 tahun lebih lama 0,08 tahun dari tahun sebelumnya yang 8,04 tahun.</p> <p>Capaian kinerja indicator Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu dari target 9,01 tahun tercapai sebesar 8,12 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90,1%.</p>



3	Harapan lama sekolah	<p>Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia tercermin dari naik turunnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dengan link https://jambi.bps.go.id/indicator/26/543/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-hls-.html menunjukkan anak-anak yang pada 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,47 tahun lebih lama 0,19 tahun dari tahun sebelumnya yang 12,28 tahun.</p> <p>Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu dari target 12,8 tahun tercapai sebesar 12,47 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97,4%.</p>
----------	-----------------------------	--

(Sumber data DISDIKBUD Kab. Sarolangun)



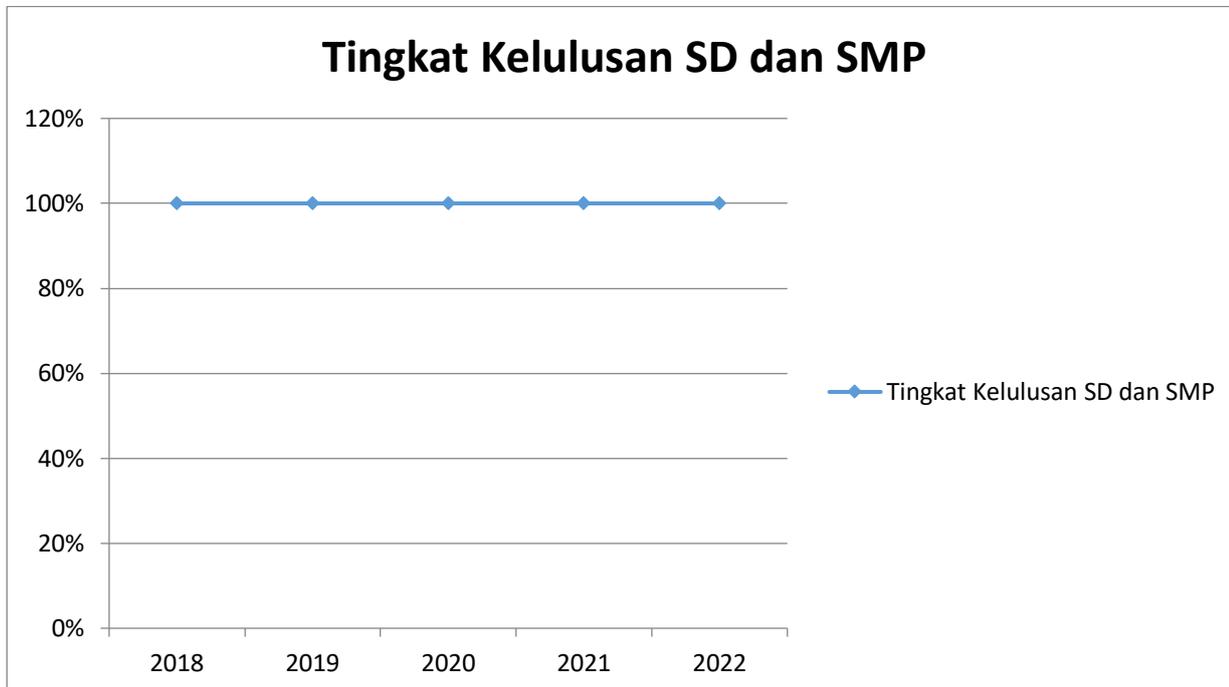
3.1.4. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Formulasi untuk menghitung angka kelulusan yaitu jumlah siswa SD dan SMP yang lulus dibagi jumlah Siswa SD kelas VI dan SMP kelas IX dikali 100%. Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang sekolah dasar dan tahun ketiga untuk jenjang sekolah menengah pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus. Pada tahun 2022 Jumlah siswa SD kelas VI sebanyak 5.410 Siswa dan yang lulus sebanyak 5.410 Siswa, untuk Siswa SMP tahun ketiga sebanyak 3.335 Siswa dan yang lulus sebanyak 3.335 siswa, jika dijumlahkan maka siswa yang lulus mencapai 100% Dibandingkan dengan capaian tingkat kelulusan SD dan SMP tahun 2021 sebesar 100%, terdapat kesamaan dengan capaian tahun tersebut, pencapaian target indikator kinerja sebesar 100 % tercapai



karena program yang dijalankan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perubahan cara USBN menjadi Asesmen Nasional.

Sedangkan tren realisasi tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :



– Berikut adalah faktor – faktor pendukung tingkat kelulusan SD dan SMP :
 Dengan ditiadakannya Ujian Nasional maka kelulusan siswa pada satuan pendidikan jika siswa telah:

1. Pelaksanaan Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
2. Siswa memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
3. Siswa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (sekolah)

– Berikut adalah faktor – faktor penghambat tingkat kelulusan SD dan SMP :

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran dalam kelas merupakan faktor dasar dalam membina, mengembangkan, dan mengajari peserta didik. Selama proses pembelajaran, guru pasti akan menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi faktor penghambat belajar, sehingga peserta didik tidak nyaman berada di kelas dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut tentu saja akan menjadi sebuah kegagalan dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor penghambat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal

a. Faktor Internal



Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik dan psikologis peserta didik. Masalah yang mungkin terjadi pada kondisi fisik peserta didik ialah sakit. Namun, untuk kondisi psikologis dapat terjadi berbagai macam kondisi, seperti: **Sikap**

Peserta Didik, Minat Peserta Didik dan Motivasi Peserta Didik

- b. Faktor eksternal yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Faktor eksternal dapat berupa: **Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan dan Faktor Sekolah**

- Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun yang telah diterapkan yaitu

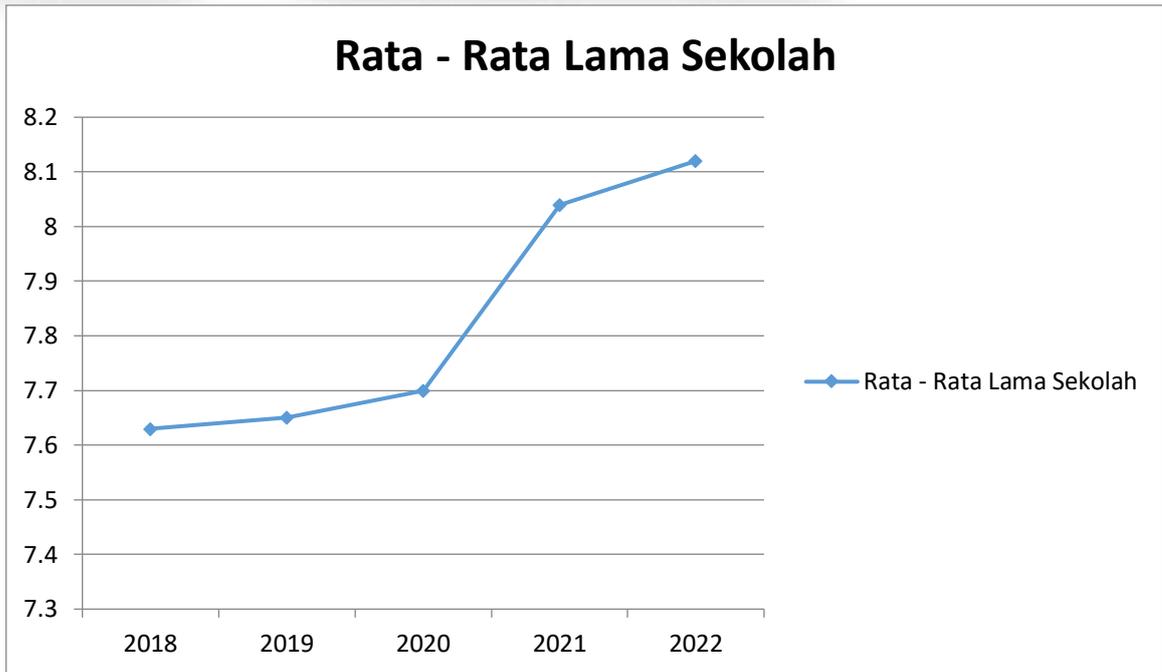
Strategi yang telah diterapkan adalah dengan melaksanakan Bimbingan dan konseling baik bagi siswa yang mengalami hambatan dalam belajar maupun bagi siswa yang berprestasi.

- Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun kedepan adalah Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun adalah meningkatkan kepedulian baik Siswa, Guru, Orang Tua dan Masyarakat sekeliling, agar saling mendukung Program Penuntasan Pendidikan di Kabupaten Sarolangun, dan meningkatkan Pendidikan Pancasila di Satuan Pendidikan kepada seluruh peserta Didik.

3.1.5. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia tercermin dari naik turunnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dengan link <https://jambi.bps.go.id/indicator/26/1937/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html> menunjukkan penduduk yang pada 2022 berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata mengayomi pendidikan selama 8,12 tahun lebih lama 0,08 tahun dari tahun sebelumnya yang 8,04 tahun. Capaian kinerja indicator Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu dari target 9,01 tahun tercapai sebesar 8,12 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90,1%.

Sedangkan tren realisasi tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :



3.2. Berikut adalah faktor – faktor pendukung rata-rata lama sekolah :

1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Anak dan Rata Lama Sekolah Anak. Fertilitas merupakan bagian dari aspek kependudukan kaitannya dengan kuantitas penduduk khususnya jumlah anak. Bertambahnya fertilitas berarti semakin menambahnya jumlah anak yang akan berpengaruh terhadap kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dalam suatu keluarga. Tujuan dari penelitian ini : 1) Mengetahui Jumlah anak di Desa Patimuan 2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah anak 3) Mengetahui rata lama sekolah anak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua Kepala Keluarga pada suatu Daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional Random Sampling. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan dihasilkan 100 responden kepala keluarga. Variabel penelitian ada tiga: 1). Jumlah anak 2). Faktor yang mempengaruhi jumlah anak 3). Rata lama sekolah anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian: Jumlah anak yang dimiliki tiap kepala keluarga tergolong sedang dengan rata-rata memiliki 2 orang anak
2. Faktor yang mempengaruhi ada 5 yaitu usia ibu, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, status pekerjaan ibu dan nilai anak namun yang paling berpengaruh yaitu pendapatan ibu, usia ibu dan status pekerjaan ibu, sedangkan untuk pendidikan ibu dan nilai anak pengaruhnya tidak terlalu kuat. Usia ibu memiliki pengaruh positif dimana semakin



muda usia ibu kemungkinan memiliki jumlah anak yang banyak semakin meningkat juga. Kemudian pendapatan keluarga, penduduk yang memiliki pendapatan besar relatif memiliki anak dengan jumlah yang sedikit, begitu juga sebaliknya. Status pekerjaan ibu berpengaruh pada jumlah anak. Ibu yang memilih untuk bekerja cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit daripada ibu yang tidak bekerja. Rata lama sekolah anak yaitu 9 tahun, rendah. Hal ini karena sebagian anak-anak masih berusia balita dan belum sekolah serta sarana fasilitas pendidikan yang masih terbatas dan belum mencukupi.

- Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun yang telah diterapkan yaitu
Mendorong kepada anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi
- Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun kedepan adalah Akan dilaksanakan kerjasama dengan stake holder untuk saling bahu membahu meningkatkan partisipasi semua anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan.

3.2.3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia tercermin dari naik turunnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dengan link <https://jambi.bps.go.id/indicator/26/543/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-hls-.html> menunjukkan anak-anak yang pada 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,47 tahun lebih lama 0,19 tahun dari tahun sebelumnya yang 12,28 tahun. Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu dari target 12,8 tahun tercapai sebesar 12,47 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97,4%.



Sedangkan tren realisasi tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :



Berikut adalah faktor – faktor pendukung harapan lama sekolah :

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 9 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini *adalah meningkatnya PAUD Holistic integrative dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional.*
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari 37 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau.
3. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari 7 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 5 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs. Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan Menengah



5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 3 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.

– **Berikut adalah faktor – faktor penghambat harapan lama sekolah:**

Faktor Penghambat Harapan Lama Sekolah antara lain:

1. Masih rendahnya motivasi siswa
2. Tidak Fokusnya siswa dalam Pembelajaran
3. Terdapatnya ketidak sesuaian hasil tes assesmen minat bakat siswa yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan harapan siswa sehingga menimbulkan konflik.

Faktor penghambat lain adalah factor Exsternal yang terdiri antara lain :

1. Adanya orang tua yang tidak mendukung hasil assensmen minat dan bakat siswa yang dilakukan oleh satuan pendidikan
2. Kekurangan sarana prasarana sekolah
3. Kurangnya konten tentang pembelajaran siswa

– **Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun yang telah diterapkan yaitu**

- a. Menerapkan konsep kebinakaan di satuan pendidikan
- b. Menekan angka perudungan
- c. Sosialisasi kebudayaan dan anti narkoba

– **Strategi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun kedepan adalah**

- a. Mengajak warga sekolah agar menerapkan profil belajar Pancasila
- b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar peduli terhadap hasil assesmen minat dan bakat siswa
- c. Memperbanyak konten-konten pembelajaran
- d. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan



TABEL 3.6
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALI SASI	%
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,33	69,49	99,81	69,25	69,21	99,94

(sumber data DINKES Kab. Sarolangun)

3.2.4. Usia Harapan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA	NARASI
1	Angka Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup adalah jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke x. ukuran yang umum digunakan adalah harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan saat itu. Capaian Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 adalah sebesar 99,88% dengan capaian kinerja nyata 69.25 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Sarolangun memiliki harapan untuk hidup umur 68-69 tahun, capaian ini tentunya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Sarolangun yaitu sebesar 69.33 tahun.

SASARAN : Meningkatkan Kualitas Kesehatan

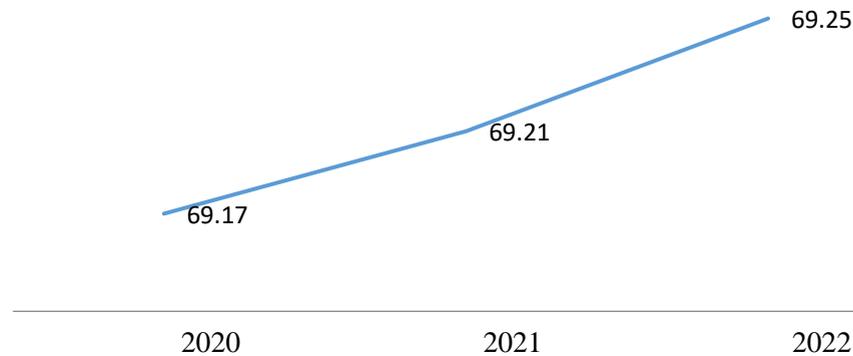
Usia Harapan Hidup adalah jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke x. ukuran yang umum digunakan adalah harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan saat itu. Capaian Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 adalah sebesar 99,88% dengan capaian kinerja nyata 69.25 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Sarolangun memiliki harapan untuk hidup umur 68-69 tahun, capaian ini tentunya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Sarolangun yaitu sebesar 69.33 tahun.

No	Indikator	2021		2022	
		Target	Capaian %	Target	Capaian %
1.	Usia Harapan Hidup	69.17	69.21 (99.94%)	69.33	69.25 (99.88%)

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian usia harapan hidup kabupaten sarolangun mengalami kenaikan dimaa pada tahun 2021 capaian yang didapatkan adalah 69.21 dengan persentase 99.94% dan pada tahun 2022 adalah 69.25 dengan persentase 99.88%.



Grafik 5
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sarolangun
Tahun 2020 - 2022



Dari grafik diatas terlihat bahwa angka harapan hidup terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebagai perbandingan dalam tiga tahun terakhir diperoleh data bahwa pada tahun 2020 sebesar 69.17, tahun 2021 sebesar 69.21 dan pada tahun 2022 sebesar 69.25.

Faktor yang mendorong tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sarolangun yang ditandai dengan terus meningkatnya kunjungan pada fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. Seluruh puskesmas yaitu sebanyak 16 unit puskesmas telah terakreditasi yang artinya puskesmas telah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dimana saat ini rata-rata satu puskesmas melayani 19.585 jiwa. 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah memiliki minimal 1 unit puskesmas. Selain itu juga fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia termasuk 51 unit puskesmas pembantu dan 102 unit pos kesehatan desa.
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat yang semakin baik, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sarolangun memperoleh penghargaan swasti saba kabupaten/kota sehat dari Kementerian Kesehatan RI.
5. Pemahaman masyarakat tentang upaya promotif dan preventif bidang kesehatan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya kegiatan promosi kesehatan di seluruh desa.

Faktor yang menghambat pada tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:



1. Kurangnya koordinasi lintas sector dalam membangun fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di kabupaten sarolangun sehingga masih banyak fasilitas Kesehatan sarolangun dengan bangunan yang kurang layak.
2. Masih kurangnya tenaga Kesehatan yang tersedia pada fasilitas pelayanan Kesehatan sehingga dalam pemberian layanan Kesehatan masyarakat masih kekurangan tenaga Kesehatan.
3. Masih banyaknya aktifitas masyarakat yang tidak sesuai dengan kegiatan masyarakat hidup bersih dan sehat seperti pencemaran air dan lingkungan sehingga kualitas air sungai sulit untuk ditemukan dengan keadaan yang bersih.

TABEL 3.7
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,9	5,22	93,47	5,8	5,52	104,82
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	71,32	66,74	93,58	72,12	64,86	89,93

(Sumber data DISNAKERTRAN, BPS Kab. Sarolangun)

3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

3.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun berdasarkan akuntabilitas kinerja yaitu Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai Kompetensi dengan indikator keberhasilan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 4,90% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 71,32% pada tahun 2022.

Hal ini merupakan salah satu indikator yang akan mendukung keberhasilan pada misi ke 2 didalam RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas SDM, Penguatan Nilai-nilai Agama dan Sosial Budaya, yang mana hal ini dapat membantu untuk mewujudkan visi kabupaten Sarolangun yakni Sarolangun Lebih Sejahtera.

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu berupaya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan



partisipasi angkatan kerja setiap tahunnya dengan melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk keterampilan melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pemagangan ke Negara Jepang dan pelatihan-pelatihan yang lain dengan berbagai kejuruan, dan dinas Tenaga Kerja juga melakukan pencarian lowongan kerja melalui perusahaan-perusahaan yang tersebar di dalam wilayah Kabupaten sarolangun dan menciptakan hubungan industrial yang baik dengan perusahaan, selain itu Dinas Tenaga Kerja juga melakukan pembinaan terhadap wagra ex transmigrasi yang ada untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya.

Dalam pencapaian keberhasilan indikator terdapat beberapa hambatan yang ditemui yaitu:

1. Nilai tingkat pengangguran terbuka didasarkan pada banyak tidaknya angkatan kerja yang menjadi pengangguran, mereka semua tidak terserap untuk mengisi kesempatan kerja, karena ketersediaan lapangan kerja yang kecil/tidak ada.
2. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempunyai pola yang beragam, pada umur 15-24 tahun TPAK pada umumnya menurun karena pada umur muda tersebut digunakan untuk bersekolah, demikian juga TPAK pada umur 60 tahun keatas juga semakin kecil karena sudah tidak produktif lagi.

Dinas tenaga kerja selalu melakukan upaya ataupun solusi untuk keberhasilan pada tahun kedepannya, dan memberikan masukan pada pemerintah, yaitu:

1. Diperlukan bantuan modal dari pemerintah dalam bentuk pelatihan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan dalam pengisian lowongan/penempatan tenaga kerja.
3. Mengusulkan peremajaan data syarat kerja untuk mendeteksi perusahaan yang belum memiliki peraturan Perusahaan.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk pembebasan Lahan KTM yang belum dibayarkan oleh Pemda.



TABEL 3.8
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
6.	Meningkatnya Keimanan dan Nilai-nilai Agama, Sosial dan Budaya dalam Masyarakat	Persentase Subuh Keliling (Subling) yang dilaksanakan dimasjid	%	98,15	-	-	79,68	84,1	105,54

(Sumber data KESRA Kab. Sarolangun)

3.1.10. *Persentase Subuh Keliling*

Dari table diatas dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra 2017-2022. Sebesar 98.15% .dan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan kembali kegiatan sublingnya.

TABEL 3.9
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
7.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sector Unggulan Daerah Serta Kesejahteraan Petani	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,94	4,32	109,64	3,89	1,31	33,68
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	1,25	1,38	42,46	0,9	1,35	150
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,42	3,95	72,88	5,07	2,92	57,59
		Nilai Tukar Petani	%	99,04	135,08	136,39	95,04	138,79	146,03

(Sumber data BPS Kab. Sarolangun)

3.1.11. *Persentase Pertumbuhan PDRB sector pertanian dan perikanan*

3.1.12. *Persentase Pertumbuhan PDRB sector industry*



3.1.13. Persentase Pertumbuhan PDRB sector perdagangan

3.1.14. Nilai Tukar Petani

- **Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan**

Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan mengalami kenaikan dari 3,94 % menjadi 4,32% atau mencapai realisasi sebesar 109,64 %. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Sarolangun pada dasarnya merupakan tupoksi yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka menyokong pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Sarolangun, Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Sarolangun bertanggung jawab atas jumlah produksi daging ternak dan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada tahun 2022, Jumlah produksi daging ternak Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 1.467.292,63 Kg yang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 dengan jumlah produksi daging sebesar 3.456.001 Kg. Pada Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan tangkap pada tahun 2022 adalah sebesar 3.064 ton yaitu mengalami kenaikan sebesar 4,91 % dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.435 Ton. Selain jumlah produksi daging ternak dan jumlah produksi perikanan tersebut Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan kabupaten sarolangun juga dipengaruhi oleh beberapa hal lain seperti pendapatan nelayan dan jumlah produksi industri hasil pengolahan ikan. Pada tahun 2022 produksi industri hasil pengolahan ikan di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 2540 Kg/tahun. Jumlah Produksi ini dihasilkan dari 19 pemilik industri pengolahan hasil ikan yang aktif di Kabupaten Sarolangun dengan jenis produk antara lain: Salai ikan, Mpek-mpek, tekwan, ikan asap, abon lele dan siomai ikan.

Pada sub sektor pertanian, mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Sarolangun baik dalam pembentukan PDB maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Adapun sub sektor pertanian terdiri dari bagian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun



tujuan seluruh hasilnya yaitu untuk dikonsumsi sendiri maupun dengan tujuan sebagai atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/ keuntungan atas resiko usaha.

Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri nonmanufaktur dan perdagangan.

Adapun capaian hasil produksi padi (GKP) tahun 2022 sebesar 28.436,68 Ton dengan luas panen 6.457,36 Hektar sehingga capaian produktivitas padi tahun 2022 sebesar 4,40 Ton/Ha. Pada tahun 2021 produktivitas padi sebesar 4,23 Ton/Ha, namun dari hasil produksi dan luas panen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu produksi padi 42.543 Ton (GKP) dan luas panen 10.069 Hektar. Sedangkan pada produksi hortikultura yaitu cabe merah pada tahun 2022 sebesar 1.310 Kwintal menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 1.429,8 Ton. Sementara pada tahun 2022 produksi perkebunan yaitu kelapa sawit sebesar 78.609 Ton meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 59.735 Ton.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan dari tahun 2017 mengalami fluktuasi, namun secara distribusi sektor pertanian kehutanan dan perikanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Sarolangun. Hal ini tentunya tidak lepas dari kondisi daerah sarolangun yang masih memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adanya faktor penghambat peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan tentunya akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan, besarnya Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan peternak dan nelayan serta jumlah PAD langsung dari produksi benih di Balai Benih Ikan. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Dampak perubahan iklim global yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir
2. Terjadinya alih fungsi lahan
3. Pandemi COVID-19
4. Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi
5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian serta sarana dan prasarana BBI sebagai salah satu penyumbang pendapatan resmi untuk daerah



6. Masih belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan
7. Kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian, peternakan dan perikanan
8. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usahatani
9. Pencemaran air pada aliran sungai Kabupaten Sarolangun berdampak pada rendahnya produksi perikanan tangkap.

Sedangkan faktor pendukung pada sub sektor pertanian yaitu:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pengembangan pertanian
2. Adanya regulasi yang mendukung pembangunan pertanian
3. Dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat
4. Tersedianya jasa perbankan untuk pembiayaan usahatani
5. Masih terbuka peluang pasar produk tanaman pangan dan hortikultura baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional
6. Kesesuaian lahan dan agroklimat/musim tanam yang variatif sehingga
7. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyampaian informasi
8. Dukungan sumber daya instistusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan teknologi dan SDA

Sebagai bentuk usaha terhadap peningkatan lajut pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan perlu adanya strategi dan arah kebijakan. Pada sub sektor pertanian terdapat strategi yang telah disusun oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu: meningkatkan produksi dan produktifitas serta kualitas produk pertanian, meningkatkan SDM Petani dan PPL dengan melakukan pendampingan dan sekolah lapang pertanian sehingga mampu mengembangkan hasil pertanian, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang tepat sasaran, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bulog yaitu mengadakan operasi pasar produk pertanian yang berasal dari wilayah Kabupaten Sarolangun serta berkerja sama dengan perusahaan swasta untuk membeli beras lokal petani kabupaten sarolangun.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyokong pertumbuhan PDRB Sarolangun dan peningkatan NTP melalui peningkatan produksi pertanian antara lain: Optimalisasi lahan pertanian terutama lahan yang sesuai Perda LP2B sehingga lahan tersebut dapat terjaga dan produktif serta mampu memenuhi



kebutuhan dan nilai tambah produk pertanian; Mengoptimalkan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); Adopsi dan penerapan teknologi pertanian; Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian yang memadai; Meningkatkan penggunaan benih/bibit berkualitas, bersertifikat dan berlabel.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Diawal tahun 2020 pandemi COVID-19 mulai mempengaruhi setiap sektor usaha termasuk sektor pertanian dan perikanan. Hal ini membuat laju pertumbuhan ekonomi secara global mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah pusat dan daerah mulai memfokuskan pada penanganan COVID-19 sehingga dalam pengalokasian anggaran lebih diutamakan pada sektor kesehatan. Terjadinya refocusing anggaran daerah mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan program kegiatan pertanian dan perikanan. Namun, adanya Dana DAK Fisik Pertanian Tahun 2020 dan 2021 menjadi angin segar bagi petani disaat Pandemi COVID-19 dalam pembangunan dan pengembangan usaha pertanian. Selain itu, masih adanya sumber pendanaan yaitu bantuan dana APBN ke petani yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Sumber daya penyuluh pertanian lapangan tentunya sangat membantu petani, terlebih pada saat pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi sangat dimanfaatkan petani dan penyuluh dalam pengembangan usaha pertanian.

Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi secara nasional menunjukkan tren positif, hal ini juga terjadi di daerah-daerah termasuk Kabupaten Sarolangun. Kebijakan pemerintah mulai memprioritaskan pemulihan ekonomi sehingga nilai tambah barang dan jasa sektor pertanian dan perikanan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Meluasnya output dan peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan permintaan terhadap barang manufaktur yang pada akhirnya akan memperluas sektor industri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka sektor jasa pun akan meningkat untuk melayani kebutuhan sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian karena PDB membutuhkan peranan sektor sektor tersebut.

- **Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industry & Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan**

Persentase Pertambahan Industri dengan target 25 % dari jumlah Industri Kecil Menengah tahun 2022 sebanyak 1.380 IKM pada akhir tahun 2022 bertambah 65 atau menjadi 1.445 mencapai 25 % meningkat 5% dari tahun 2021.



Sedangkan Persentase Pedagang yang memiliki izin usaha perdagangan tahun 2022 dengan target sebesar 63 % dari jumlah Gudang 102 yang terealisasi 50 % atau 32 jumlah Tanda Daftar Gudang yang telah dimiliki terjadi kenaikan 3 % dari tahun 2021.

TABEL 3.10
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
8.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	9.18	8.48	92,37	9,25	8,87	95,89

(sumber data BPS Kab. Sarolangun)

3.1.15. *Persentase Penduduk Miskin*

Dari table diatas data masi merupakan data sementara, dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk persentase Realisasi penduduk miskin sebesar 9.18%. Pada posisi tahun 2022 dilihat dari data target tahun 2021 sebesar 9,25 % dan realisasi persentase penduduk miskin tahun 2022 yang datanya diambil dari BPS dengan situs resmi sarolangunkab.bps.go.id sebesar 8,48%. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2022 ini dikarenakan tidak ada lagi pandemi yang mewabah Indonesia itu sebabnya kemiskinan mulai menurun walau tidak terlalu signifikan. Namun jika dilihat pada tahun 2019 dan 2020 Dari capaian tahun 2019 dan 2020 dilihat dari penetapan dalam dokumen RPJMD, angka kemiskinan mengalami penurun selama 2 tahun ini , artinya Kabupaten Sarolangun telah sukses dalam menangani angka kemiskinan walaupun angka yang didapat tidak terlalu signifikan, dimana factor – factor yang membuat angka kemiskinan Dikabupaten Sarolangun menurun. Ini tidak lepas dari Program –program Bapak Bupati yang telah dilaksanakan. dimana pembangunan infrastruktur yang semakin baik di daerah desa-desa terpencil. Sehingga aktifitas masyarakat mengalami peningkatan



artinya pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Dan pastinya akan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. Kemudian dilihat dari program PMKS yang ada Di Kabupaten Sarolangun juga merupakan salah satu pengetasan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada Kabupaten Sarolangun.

TABEL 3.11
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	TAR GET	REALI SASI	%
9.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	51	53.33	104	50.7	45	88.75
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86	91.25	106	85	90.3	106
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48.11	53.98	112	48.11	53.98	112

(Sumber data DLH Kab. Sarolangun)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pengungkapan akuntabilitas kinerja yang disajikan dalam Laporan LAKIP adalah hasil pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan bentuk tabel untuk menerangkan mengenai kegiatan/sasaran apa yang diukur, indikator yang dipakai, dan capaian yang dibandingkan dengan rencana. pengukuran kinerja Penyajian informasi akuntabilitas dalam bagian ini dibagi kedalam masing-masing tujuan dan sasaran yang meliputi antara lain:

Penjelasan singkat mengenai tujuan dan sasaran yang dibahas; Dalam penjelasan tujuan dan sasaran harus menguraikan sasaran/ tujuan yang akan dicapai yang dinyatakan dalam dokumen perjanjian kinerja

Tujuan dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :



Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam jangka menengah. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan

3.1.16. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) target tahun 2021 sebesar 50,7 dengan realisasi kinerja sebesar 45 dan capaian sebesar 88,75%. sedangkan tahun 2022 dari target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 51, dan terealisasi dengan indeks sebesar 53,33 dengan capaian kinerja sebesar 104%. Maka dapat di lihat jika dari tahun 2021 Indeks Kualitas Air (IKA) Terjadi Kenaikan sebesar 15,25%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2022 Indeks Kualitas Air (IKA) juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,33%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Sarolangun di dapat bobot sebesar 53,33 yang dikategorikan tercemar ringan, hal ini berdasarkan dari analisis data kualitas air sungai yang di pantau pada 6 titik pantau sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Sarolangun. Keenam sungai tersebut dipantau dalam 2 (dua) periode yang mewakili musim hujan dan kemarau.

Beberapa hal yang meyebabkan peningkatan Indeks kualitas air sungai antara lain :

1. Musim hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi pengenceran bahan pencemar menjadi lebih tinggi.
2. Pembinaan pengendalian pencemaran air terhadap sumber pencemar dilakukan secara berkala dan optimal.
3. Terdapat 2 (dua) titik pantau yang memenuhi baku mutu sehingga meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA).



3.1.17. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) target tahun 2021 sebesar 85 dengan realisasi kinerja sebesar 90,3 dan capaian sebesar 106%. Sedangkan tahun 2022 dari target yang ditetapkan RPJMD yaitu sebesar 86 indeks, realisasi kinerja sebesar 91,25 dengan capaian kinerja sebesar 106%. Maka dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun 2021 IKU mengalami peningkatan indeks yaitu sebesar 0,95%. Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Udara (IKU) juga mengalami Peningkatan dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 5,25%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara sebagai berikut :

1. Musim kemarau yang pendek sehingga kekeringan tidak berkepanjangan yang mengakibatkan tidak adanya kebakaran hutan yang merusak kualitas udara.
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang semakin meningkat sehingga meningkatkan kualitas udara
3. Pengawasan terhadap penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan dilakukan secara optimal dan berkala.

3.1.18. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) target tahun 2021 sebesar 48,11 dengan realisasi kinerja sebesar 53,98 dan capaian sebesar 112%. Sedangkan tahun 2022 dari target yang ditetapkan RPJMD yaitu sebesar 48,11 indeks, realisasi kinerja sebesar 53,98 dengan capaian kinerja sebesar 112%. Maka dapat dilihat Indeks Kualitas Lahan tahun 2021 cenderung sama dengan Indeks Kualitas Lahan tahun 2022. jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,87%.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi peningkatan Indeks Kualitas Lahan nya antara lain :

1. Telah dilakukan pendataan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sarolangun yang merupakan salah satu factor pendukung dalam penghitungan Indeks Kualitas Lahan



2. Adanya data Rehabilitasi Lahan (RHL) dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan data perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan formulasi $IKLH = IKA + IKU + IKL$, maka di dapat nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 adalah sebesar 68,83. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada 65,31. Terjadi peningkatan sebesar 3,52%

4. Menjelaskan tindakan pemecahan masalah/hambatan di masa yang akan datang dan strategi-strategi dalam rangka peningkatan kinerja

- Indeks Kualitas Air (IKA), Adapun masalah yang dihadapi diantaranya adalah Masih maraknya masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah aliran sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai yang berdampak pada menurunnya Mutu air sungai. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan dan pengendalian pencemaran air terhadap sumber pencemar.
- Indeks Kualitas Udara (IKU), Masalah yang dihadapi dalam peningkatan Kualitas Udara seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan banyaknya kabut asap akibat dari pembakaran sehingga terjadinya penurunan Kualitas Udara. Adapun strategi yang dilakukan dapat berupa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL), Masalah yang dihadapi berupa masih banyaknya penebangan hutan yang bertujuan untuk pertanian dan pertambangan, belum terdapat kawasan taman Kehati di Kabupaten Sarolangun yang menjadi factor penambah perhitungan Indeks Kualitas Lahan, Strategi yang dilakukan adalah Dengan menginventarisir dan melakukan pemetaan lokasi kawasan hutan Kehati yang terdapat di Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Mandiangin Timur guna menambah nilai pemantauan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



- Mutu Pelayanan, Masalah yang dihadapi berupa kurangnya pemahaman dan penguasaan materi oleh pegawai/petugas bidang pelayanan sehingga berdampak pada penurunan mutu pelayanan, hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pendidikan, pelatihan dan training terhadap pegawai/petugas di bidang pelayanan.

TABEL 3.12
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALIS ASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALIS ASI	%
10.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sakip	Peringkat	BB	B	B	B	B	B
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(Sumber data: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia)

3.1.19. Predikat Sakip

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP Secara khusus bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Untuk target laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sarolangun tahun 2021 yaitu B (baik) dan berdasarkan laporan hasil evaluasi LAKIP dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia mendapat predikat B (baik),dapat dikatakan target tercapai namun Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas



pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum berorientasi pada hasil di pemerintah kabupaten sarolangun cukup baik namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan. Dengan Rincian penilaian :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,20
2	Pengukuran Kinerja	25	14,10
3	Pelaporan Kinerja	15	9,46
4	Evaluasi Internal	10	6,11
5	Capaian Kinerja	20	10,72
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Dan Untuk target laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sarolangun tahun 2022 adalah BB (sangat baik) dan berdasarkan laporan hasil evaluasi LAKIP dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia mendapat predikat B (baik), menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dengan rincian penilaian :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,40
2	Pengukuran Kinerja	30	16,76
3	Pelaporan Kinerja	15	9,56
4	Evaluasi Internal	25	14,15
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan berdasarkan Peraturan menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Faktor penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2022 yaitu :

1. Penjenjangan/ Cascading kinerja belum mengaju pada Peraturan menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
2. Penjenjangan/ Cascading kinerja belum sepenuhnya diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan



3. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 pada beberapa perangkat daerah belum disampaikan melalui esr.menpan.go.id secara lengkap sampai ke level terkecil.
4. Terdapat tujuan/sasaran strategis perangkat daerah yang belum sepenuhnya menjawab seluruh mandat, tugas dan fungsi dari organisasinya.
5. Terdapat sasaran dan indikator pada level eselon III yang belum mengukur outcome sasaran strategisnya.
6. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya focus pada pencapaian sasaran strategis.
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran, sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaian
8. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual, belum memanfaatkan teknologi informasi
9. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
10. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
11. Penilaian terhadap pelaporan kinerja pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan keselarasan kinerja individu dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh
12. LPPD pemerintah kabupaten sarolangun tahun anggaran 2021 maupun laporan kinerja perangkat daerah belum di publikasikan secara umum
13. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memuat analisis capaian kinerja yang komprehensif, belum secara rinci mengungkapkan factor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi.
14. Laporan hasil evaluasi belum disampaikan dokumennya secara lengkap
15. Belum adanya kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi sapis internal.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja yaitu:



1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil.
3. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menilai capaian organisasi dan individu agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment.
4. Menyampaikan laporan kinerja melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang factor-faktor yang mempegaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.20. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan akuntabilitas Kinerja yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang baik, dengan indikator keberhasilan yaitu diraihnya opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini sesuai dengan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah yang Transparan dan Akuntabel untuk Menuju Sarolangun yang Lebih Sejahtera” dan sesuai dengan target visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Mengoptimalkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mempertahankan WTP”. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selalu berupaya dalam percepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi setiap tahunnya.



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/ sasaran pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian/lembaga pemerintah (K/L). WTP sangatlah penting bagi suatu K/L karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu K/L terbebas dari korupsi.

Opini diberikan setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun setelah berakhirnya tahun anggaran, Berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat 3 disebutkan “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yaitu : **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**

1. Pencapaian realisasi indikator kinerja untuk tahun 2017 s/d 2021 (Opini BPK terhadap LKPD)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian												



1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD (laporan keuangan pemerintahan yang daerah)	Opini WTP	Opini WTP	100%												
---	---	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

2. Pencapaian Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi di Wilayah Provinsi Jambi tahun 2021

No	Pemerintah Daerah	Opini BPK Untuk Tahun 2021
1	Pemerintah Provinsi Jambi	WTP
2	Pemerintah Kota Jambi	WTP
3	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	WTP
4	Pemerintah Kabupaten Batanghari	WTP
5	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	WTP
6	Pemerintah Kabupaten Merangin	WTP
7	Pemerintah Kabupaten Kerinci	WTP
8	Pemerintah Kota Sungai Penuh	WTP
9	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	WTP
10	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	WTP
11	Pemerintah Kabupaten Tebo	WTP
12	Pemerintah Kabupaten Bungo	WTP



3. Tabel Perbandingan Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja (Opini BPK terhadap LKPD)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1..	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58.552.539,-	57.195.489,-	98,10	64.599.248,-	64.594.285,-	99,99
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan, SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	136.351.463,-	133.762.489,-	97,68	133.310.246,-	133.253.048,-	99,95
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.699.812,-	20.317.050,-	98,15	76.128.669,-	76.103.333,-	99,96
JUMLAH				215.603.814,-	211.275.028,-		274.038.163,-	273.950.666,-	

Dari tabel dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah anggaran dan serapan anggaran pada kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran, untuk jumlah anggaran terjadi peningkatan besaran anggaran pada tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp.215.603.814,- pada tahun 2021, naik sebesar Rp.58.434.349,- menjadi Rp.274.038.163,- atau terjadi kenaikan sebesar 27,10% dari anggaran tahun 2021.

Sedangkan realisasi serapan anggaran pada kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran juga mengalami peningkatan serapan anggaran di tahun 2022, dari serapan anggaran sebesar Rp.211.275.028,- pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp.62.675.638,- menjadi Rp.274.038.163,- atau mengalami peningkatan sebesar 29,66% dari serapan anggaran tahun 2021.



Adapun hambatan yang ditemukan dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan dokumen yang diperoleh oleh BPKAD dalam percepatan penyusunan laporan keuangan
2. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan prasarana pendukung
4. Penyesuaian aplikasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam percepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan Opini WTP yaitu:

1. Melakukan rekonsiliasi data secara rutin dengan SKPD
2. Melakukan sosialisasi kepada SKPD dalam penggunaan aplikasi dan proses penyusunan
3. Melaksanakan pelatihan khusus kepada para Operator dan Admin dalam penggunaan aplikasi
4. Peningkatan kompetensi kepada staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui pelatihan atau bimbingan teknis.
5. Menganggarkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan.

TABEL 3.13

**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	%
11.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91.32	90.81	99.5	91,12	90.55	99,37
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	-	-	-	-	-	-

(sumber data DP3A Kab. Sarolangun)

3.1.21. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Visi Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun adalah “ Sarolangun lebih Sejahtera” . sedangkan misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun adalah’ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender untuk mencapai Sarolangun Lebih Sejahtera “.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan program
- b. Sarana dan Prasarana operasional pergerakan masyarakat yang kurang memadai
- c. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
- d. Keterbatasan sumber daya secara kuantitas dan tenaga professional serta penguasaan teknologi informasi
- e. Metode fasilitas dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten /kota dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan perlindungan anak masih kurang optimal
- f. Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin luntarnya budaya gotong royong dan budaya yang masih rendah
- g. Kurang berfungsinya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- h. Meningkatnya Kasus KDRT
- i. Masih rendahnya pemahaman tentang PUG, baik instansi Pemerintah, maupun swasta
- j. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang masih sulit dijangkau dan tertinggal

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Dinas P3A untuk lebih optimalnya pencapaian target dan Pelayanan kepada masyarakat yaitu:

1. Memberikan motifasi dan mediasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta serta mensosialisasikan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga
2. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan mediasi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak
3. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan anak baik di Kabupaten maupun di kecamatan sampai desa/kelurahan.



TABEL 3.14
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
				TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	TAR GET	REALI SASI	%
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	86.89	93.06	107.10	86.67	92.46	106.68
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	81.80	85.09	103.76	80.3	79.81	99.37
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	Nilai	82.00	82.45	100.55	80.5	80.96	100.57

(Sumber data DPMPSTP, DINKES, DIS DUKCAPIL)

3.1.22. *Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan*

Kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan indikator persentase Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat, dilakukan dengan melibatkan pihak ke 3 (Independen) untuk membuat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2022 sebanyak 1.514 izin dan nilai hasil capaian IKM sebesar : 93,06 %. Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2022 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sarolangun melebihi 100 respondent maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 93,06**. Dengan angka Indeks sebesar 93,06, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik.



Berdasarkan hasil laporan survey IKM yang telah dilakukan sebelumnya kinerja unit pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun selalu berada dalam mutu pelayanan baik. Untuk itu kualitas dan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Sarolangun harus terus di pertahankan dan ditingkatkan sehingga makin baik. Selain itu juga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan internal terutama pada SDM yang memberikan pelayanan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas Pelayanan sehingga dapat menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

Perbandingan dengan Target, target tahun lalu dan RPJMD

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2022	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Realisasi	Target			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	92,46	86,89	93,06	107,10	86,89	107,10	Sangat baik

Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu

- a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sarolangun diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP Perizinan yang memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 7 Hari, sedangkan Perizinan yang tidak memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 7 Hari, setelah berkas permohonan lengkap dan benar. Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat akan memperoleh perizinan dengan cepat dan mudah.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan team teknis SKPD terkait sesuai dengan permohonan yang diajukan, kemudian mengadakan cek lokasi



perizinan. Perizinan diselesaikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun sesuai standar waktu yang ditetapkan.

d. Jumlah Pengaduan Keluhan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media social yang dijalankan dengan prinsip mudha, terpadu dan tuntas. Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sarolangun sebagai saluran masyarakat untuk menyampaikn suatu tindakan atau peristiwa terkait proses pelayanan perijinan atau penggunaan produk hukum ijin.

Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online merupakan bagian dari, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui mekanisme pengaduan sebagai berikut :

1. Pengaduan Tidak Langsung

- a. Secara Online : dengan cara menyampaikn pengaduan ke alamat Wbsite resmi DPM PTSP melalui email : dpmptsp.sarolangun@gmail.com pilih Menu Pengaduan Online
- b. Melalui short Massage Service (SMS): short Massage Service (SMS) Center dengan mengirim ke no : 0000 0000 0000 dengan format yang sudah di tentukan ketik “Pengaduan <spasi> Jenis Perizinan <spasi> Nomor Tanda Terima Permohonan <spasi> Isi Keluhan dan harapan.”

2. Pengaduan Langsung :

- a. Melalui telpon ke 081294937314
- b. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengisi Buku Pengaduan, formulir Pengaduan yang telah disediakan sesuai dengan pelayanan yaitu :
 - Senin s/d kamis Pukul 08.30 s/d 15.30 Wib
 - Jumat Pukul 07.30 s/d 11.00 Wib

3. Syarat Pengaduan



Beberapa hal yang diperlukan agar pengaduan dapat di jelaskan lebih lanjut :

- Membuat identitas dan alamay pemohon yang jelas dan lengkap
- Melampirkan alamat Email dan No Hp yang masih aktif
- Substansi permasalahan yang disampaikan jelas
- Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian
- Apabila ada data pendukung, maka disampaikan secara lengkap dan akurat

Laporan akan diverifikasi untuk ditindaklanjuti, masyarakat juga dapat mengawal penanganan setiap laporan secara trasparan dan akuntabel melalui berbagai fitur yang tersedia, termasuk fitur-fitur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pelapor.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	107,10	100	0

Faktor yang mempengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya kinerja :

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Masyarakat dalam menggunakan Aplikasi OSS.

3.1.23. Indeks Kepuasan Dinas Kesehatan

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsure pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit



penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil penilaian pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten sarolangun telah memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil IKM yaitu 85,09 pada tahun 2022 dengan target 81,8, sedangkan pada tahun 2021 nilai IKM yang diperoleh yaitu sebesar 79.81 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada tahun 2022.

Perbandingan dengan Target, target tahun lalu dan RPJMD

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2022	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Realisasi	% Capaian			
1	IndeksKepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	79.81	81.80	85.09	103,76	81.80	103,76	Sangat baik

Faktor pendukung :

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan Kesehatan

1. Biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah menyesuaikan kemampuan masyarakat atau sesuai dengan beban biaya yang ditanggung oleh asuransi Kesehatan bagi penggunanya.
2. Jenis pelayanan Kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan persyaratan administrative, dimana persyaratan tersebut sangat mudah dipenuhi oleh pengguna layanan Kesehatan.
3. Pelayanan diseluruh unit pelayanan Kesehatan yang ada di kabupaten sarolangun sangat menjunjung tinggi sikap kesopanan, keramahan, dan kerapian penampilan petugas saat memberikan pelayanan Kesehatan.
4. Petugas Kesehatan sudah memberikan layanan Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku kepada masyarakat dan juga mudah dipahami.



5. Tata cara pengaduan dalam pengaduan, saran dan masukan juga sudah difasilitasi dengan baik untuk masyarakat.

Faktor penghambat :

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya inovasi dan yang dilakukan oleh unit pelayanan Kesehatan yang ada di kabupaten sarolangun dalam memberikan pelayanan Kesehatan.
2. Masih kurangnya ketersediaan SDM yang ada di unit layanan Kesehatan.
3. Masih kurangnya dukungan lintas sector dalam meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan.
4. Sarana dan prasarana yang masih kurang dalam memberikan pelayanan Kesehatan sehingga masih perlu dilakukan rujukan untuk pelayanan yang lebih lanjut.

Efisiensi Anggaran :

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 dan 2022.

No	Anggaran		Realisasi		%		Ket
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100	100	Tetap

Untuk realisasi anggaran terkait Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan dimana pada tahun 2021 dan 2022 anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 100.000.000 untuk pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan, dimana anggaran tersebut terealisasi 100% baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan Sarolangun dalam menjalankan fungsi koordinasi sampai dengan desember 2022 sebanyak 738 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun beserta



Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan merupakan faktor penggerak utama dalam mencapai tujuan dan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan termasuk diantaranya kelompok tenaga kesehatan, yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang semakin tinggi.

Rekapitulasi SDM di puskesmas seluruh Kabupaten Sarolangun bahwa jumlah puskesmas 16 puskesmas masing-masing rawat inap 14 puskesmas dan 2 puskesmas nonrawat inap, kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Jumlah SDM di puskesmas secara keseluruhan : 1.041 orang dengan rincian Tenaga Medis berjumlah: 63, Kefarmasian : 33 orang, perawat: 293 orang, Tenaga Bidan: 449 orang, tenaga kesehatan masyarakat: 27 orang, tenaga kesehatan lingkungan: 22 orang, teknik biomedika 19 orang, Tenaga gizi: 23 orang, Keterampilan Fisik 0 orang, Keteknisan Medis 24, Asisten Tenaga Kesehatan ; 11, Tenaga Penunjang 67 orang. Sedangkan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 Rumah sakit, 1 Rumah sakit milik pemerintah dan 1 Rumah sakit milik swasta.

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	103,76	100	100

Anggaran dan realisasi keuangan terkait peningkatan Kualitas SDM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Anggaran		Realisasi		%		Ket
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1.	165.045.218	102.309.907	132.567.879	93.460.800	80.32	91.35	Naik

Untuk realisasi anggaran terkait peningkatan mutu SDM pada tahun 2022 anggaran yang tersedia menurun dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021



sebesar 165.045.218 dan 2022 sebesar 102.309.907 dan capaian 2022 naik dibandingkan tahun 2022 dimana 2021 sebesar 80.32% dan 2022 sebesar 91.35%. Anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan mutu SDM Kesehatan seperti pelatihan dan lain sebagainya sebagai bentuk pengembangan mutu tenaga Kesehatan.

3.1.24. Indeks Kepuasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan public terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan Publik dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada table diatas dapat dilihat bahwa pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2021 target 80.00 dengan realisasi 80.96 dan capaian kinerja sebesar 100,57%. Pada tahun 2022 target 82.00 dengan realisasi 82.45 dan capaian kinerja sebesar 100,55%. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan setiap tahun dengan kategori **sangat baik**.

Perbandingan dengan Target, target tahun lalu dan RPJMD

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2022	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Realisasi	% Capaian			
1	IndeksKepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	80.96	82.00	82.45	100,55	82.00	100,55	Sangat baik

Faktor Pendukung

Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepuasan kepada masyarakat berbagai program inovasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yaitu :

a. Kado Terindah

Kado Terindah (Kolaborasi Dokumen Terintegrasai Pasca Menikah) yang merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Sarolangun dengan Kemenag Kabupaten Sarolangun terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan berupa KTP dan KK.

- b. Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun dengan Dinas Kesehatan (dalam hal ini Bidan dan Bidan Desa) dalam rangka percepatan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir.
- c. JUBAH
Jubah atau Jum'at Bahagia adalah program dimana pada setiap hari jum'at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun turun kerumah masyarakat yang sakit, difabel dan lansia untuk Perekaman KTP.
- d. JEBOL
Jebol atau jemput bola adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun turun kedesa-desa untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Faktor Penghambat

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terdapat beberapa factor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yaitu :

- a. Kapasitas listrik dan tegangannya yang masih rendah
- b. Peralatan yang sudah lama seperti :
 - Alat perekaman
 - Komputer PC
- c. Fasilitas ruang pelayanan
- d. Kendaraan operasional yang tidak bisa menjangkau masyarakat terpencil

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)

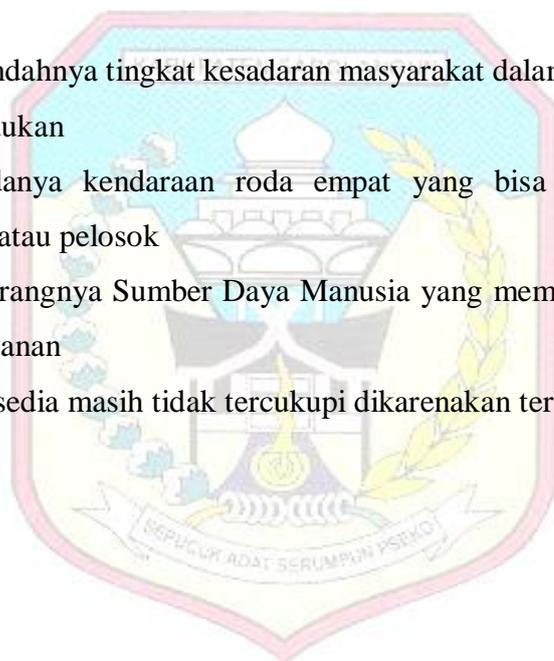


1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	100,55	100	0
----	--	--	--------	-----	---

Faktor yang mempengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya kinerja :

- a. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja yaitu sebagai berikut :
- Pelayanan keliling yang dilakukan ke desa-desa untuk masyarakat terpencil
 - Pelayanan langsung ke masyarakat yang disabilitas
 - Pelayanan tidak dikenai biaya (gratis)
- b. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja yaitu sebagai berikut :
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan
 - Tidak adanya kendaraan roda empat yang bisa menjangkau masyarakat terpencil atau pelosok
 - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dibidang IT dan pelayanan

Fasilitas yang tersedia masih tidak tercukupi dikarenakan terbatasnya anggaran





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan ***“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”*** dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal.



Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

